

**PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN TERHADAP KEGUNAAN
SISTEM KEUANGAN AKUNTANSI DAERAH
DI KABUPATEN KLATEN**



PUBLIKASI ILMIAH

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Disusun Oleh:

UMAR KUSUMA ATMAJA
B 200 110 150

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN TERHADAP KEGUNAAN
SISTEM KEUANGAN AKUNTANSI DAERAH
DI KABUPATEN KLATEN**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

UMAR KUSUMA ATMAJA
B 200 110 150

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



(Dra. Nursiam, M.H, Ak, CA)

NIK. 524

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN TERHADAP KEGUNAAN
SISTEM KEUANGAN AKUNTANSI DAERAH
DI KABUPATEN KLATEN**

Oleh:

UMAR KUSUMA ATMAJA

B 200 110 150

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 30 April 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dra. Nursiam, M.H, Ak, CA
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dra. Mujiyati, M.Si
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Dr. Zulfikar, S.E., M.Si
(Anggota 2 Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Prayono, S.E., M.Si.)
NIK.642



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

FAKULTAS EKONOMI

Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Telp. (0271) 717417 Surakarta - 57102

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Umar Kusuma Atmaja**
NIRM : **11.6.106.02030,50150**
Jurusan : **Akuntansi**
Judul Skripsi : **PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN KLATEN**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dan serahkan ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti dan atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi apapun dari Fakultas Ekonomi dan atau gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Surakarta, 30 April 2016

Yang membuat pernyataan,



Umar Kusuma Atmaja

PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN TERHADAP KEGUNAAN SISTEM KEUANGAN AKUNTANSI DAERAH DI KABUPATEN KLATEN

Abstract

This study, entitled "Effects of Organizational Behavioral Factors to Regional Financial Accounting System utilities in Klaten District". This study aims to determine, analyze and obtain empirical evidence about the influence of behavioral factors of the organization's financial accounting system usability area in the district of Klaten in accordance Permendagri 64 2014 Top 59 Amendment Regulation 2007. This study was conducted using a survey method with questionnaires. The study population was all the heads of the finance department at the office of Sub SKPD Klaten district. Data analysis was performed to test the validity and reliability, test classic assumptions and hypothesis testing with multiple linear regression method. This study uses primary data and obtained by distributing questionnaires to 60 respondents.

The results showed that the behavioral variables organization (supervisor support, clarity of purpose, training) affects the area of financial accounting system usability. This shows that support for the boss, clarity of purpose and training can affect usability in realizing the area of financial accounting system is better in an agency.

Keywords: Behavioral Organization, Regional Financial Accounting System

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Kabupaten Klaten". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh factor keperilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di kabupaten klaten sesuai Permendagri No. 64 Tahun 2014 Atas Perubahan Permendagri No.59 Tahun 2007. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survey dengan kuesioner. Populasi penelitian ini adalah semua kepala Sub bagian keuangan di kantor SKPD kabupaten Klaten. Analisis data dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan data primer dan diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 60 responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Keperilakuan organisasi (dukungan atasan, kejelasan tujuan, pelatihan) berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan dapat mempengaruhi dalam mewujudkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah lebih baik dalam suatu instansi.

Kata kunci: *Keperilakuan Organisasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.*

1. PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan reformasi pengelolaan keuangan negara. Paket peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemendagri Nomor 64 Tahun 2014. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbagai peraturan serta perundang-undangan tersebut diatas diharapkan dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan Negara dalam rangka menjadikan good governance dan clean government.

Paket peraturan perundang-undangan tersebut menggantikan ketentuan perundang-undangan warisan kolonial yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan pengelolaan keuangan Negara modern. Selain paket peraturan perundang-undangan keuangan tersebut diatas, juga telah diterbitkan peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan pengaturan keuangan sehubungan dengan adanya desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah: 1). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 2). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, 3). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 4). Peraturan Pemerinta Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 5). Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 6). Pemendagri Nomor 64 tahun 2014.

Dengan lahirnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah akan menjadi transparan untuk tahun 2007 dan seterusnya. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan akuntansi terhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, sehingga menghasilkan laporan keuangan. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2007 SKPD di setiap Kabupaten mulai berupaya mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi (Bodnar dan Hopwood, 1995). Penelitian yang dilakukan Azhar (2008), tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regulasi, komitmen, SDM bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan Permendagri No. 13 tahun 2006, sedangkan regulasi tidak mempengaruhi secara signifikan. Penelitian yang dilakukan Heri Hidayat (2008) tentang Analisis Implikasi Ketidaksesuaian Rancangan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKPD), hasil menunjukkan bahwa sebanyak 38 temuan yang mengindikasikan perbedaan antara aturan (format standart) yang berlaku yaitu PP no. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006, dikarenakan belum menggunakan Struktur organisasi baru yang sesuai PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 47 Tahun 2006 , Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Pemendagri No. 64 Tahun 2014

Faktor perilkakuan yang akan dibahas oleh peneliti meliputi faktor organisasional (Dukunagn Atasan, Kejelasan tujuan, dan Pelatihan). Penelitian ini akan menguji Pengaruh Keperilakuan organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sesuai Permendagri No. 64 Tahun 2014 Atas Perubahan Permendagri No.59 Tahun 2007, dimana sistem tersebut mulai diimplementasikan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini akan menguji pengaruh faktor perilaku organisasional, dalam meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Pemerintahan Kota Klaten.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kontinjensi (Contingency Theory)

Teori kontinjensi menyatakan bahwa tidak ada sistem akuntansi manajemen yang dapat diterapkan secara universal. Keefektifan penerapan sebuah sistem bergantung kepada kesesuaian antara sistem tersebut dengan lingkungan dimana sistem tersebut diterapkan serta menekankan bahwa desain sistem pengendalian dan perencanaan adalah keadaan khusus yang tidak ada ketentuan umum mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi khusus tersebut dan ada ketidakpastian atau kontinjensi (*contingency*) dari aktivitas dan teknik yang membangun sistem pengendalian dan sistem perencanaan suatu organisasi. Otley (1980), menyatakan Teori kontijensi didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem yang secara universal selalu tepat diterapkan pada seluruh organisasi pada setiap keadaan, tetapi sistem akuntansi tersebut tergantung pada faktor-faktor situasional dalam organisasi. Kesesuaian (*fit*) yang lebih baik antara sistem pengawasan dengan variabel kontinjensi menghasilkan kinerja organisasi yang

meningkat. Berdasarkan pada *Contingency Theory*, dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi sistem akuntansi, sistem pengelolaan keuangan daerah, tergantung pada kondisi Pemda yang bersangkutan.

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori Agensi dengan asumsi peningkatan kepentingan pribadi yang menyebabkan konflik antara principal dan kontraktual untuk mengatasi masalah moral hazard dan asimetri informasi.

Teori keagenan berfokus pada persoalan asimetri informasi: *agents* mempunyai informasi lebih banyak tentang kinerja aktual, motivasi, dan tujuannya yang sesungguhnya, yang berpotensi menciptakan *moral hazard* dan *adverse selection*. Prinsipal sendiri harus mengeluarkan biaya (*costs*) untuk memonitor kinerja *agents* dan menentukan struktur insentif dan monitoring yang efisien (Petrie, 2002).

Keperilakuan Organisasi

Keperilakuan organisasi dalam implementasi sistem ada tiga aspek, meliputi dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan.

Faktor-faktor tersebut didefinisikan sebagai berikut (Chenhall, 2004) :

1. Dukungan atasan adalah keterlibatan atasan dalam kemajuan proyek dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan. Indikator sebagai berikut ; Memberikan wewenang, memberikan dukungan pada setiap keputusan, melaksanakan pekerjaan dengan baik, menghargai pendapat, kebebasan dalam mendiskusikan masalah, kepercayaan, kebebasan dalam berpendapat, perhatian dan menerima dukungan atasan.
2. Kejelasan tujuan adalah kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi. Indikator sebagai berikut : Kejelasan dari tugas-tugas, kejelasan dari tujuan organisasi, patuh dan loyal, memahami tujuan dari pekerjaan dan pencapaian tujuan.
3. Pelatihan adalah usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem. Indikator sebagai berikut : Ketrampilan kerja, jenis penelitian, pelatihan diberikan dengan jelas, cara-cara spesifik, fasilitas pelatihan, jenis penelitian sesuai dengan bidang, pengembangan kemampuan dan pengarahan atau pelatihan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi

Ada berbagai definisi atau pengertian akuntansi yang berasal dari berbagai lembaga dan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Menurut *Accounting Principles Board* (1970), Akuntansi adalah kegiatan jasa. Fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam

pengambilan keputusan ekonomik dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan.

Menurut *American Accounting Association* (1966), Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta laporan.

Sistem Akuntansi Keuangna Daerah

Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang terdiri atas kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah *input* (masukan) menjadi *output* (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. *Output* -nya adalah laporan keuangan. Menurut Permendagri No. 64 tahun 2014, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. Tahap-tahap dalam siklus akuntansi dimulai dari bukti transaksi, jurnal, posting ke buku besar, membuat neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo, membuat laporan keuangan, jurnal penutupan, dan neraca setelah penutupan.

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip-prinsip, dasar, konvensi-konvensi, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah memuat ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam penyusunan laporan seperti Pengertian, Klasifikasi, Pengakuan, Pengukuran, dan kepentingan lainnya yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan daerah seperti :

- a. Basis Akuntansi yang dpergunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
- b. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

Akuntabilitas dan Transparansi

Secara sederhana akuntabilitas (*accountability*) mengandung arti sebagai pertanggung jawaban. Apabila dilihat dari aspek akuntansi dan manajemen pemerintah, Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) mendefinisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan-tujuan dan saran-saran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik (Rosjidi, 2001).

Transparansi adalah menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, laporan pertanggungjawaban merupakan hasil dari proses akuntansi dari transaksi pemerintah. Laporan pertanggungjawaban umum terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Kesenambungan antara penerimaan pemerintah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

3. METODE

Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau minat yang ingin diinvestigasi oleh peneliti (Sekaran, 2006: 121). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola keuangan SKPD di Pemerintah Daerah Klaten. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009). Responden dalam penelitian ini adalah *middle manager*. *Middle manager* merupakan pelaksana sekaligus penghubung antar *top manager* dan *low manager*. Untuk responden *middle manager*, diwakili oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Sekretariat Bagian Keuangan dari sebagian populasi yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling method* yaitu cara menentukan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Kriteria pemilihan sampel sebagai berikut:

- a) Kepala Sub dan/atau Sekretariat SKPD di bagian keuangan yang bersedia menjadi responden
- b) Kepala Sub dan/atau Sekretariat SKPD di bagian keuangan yang bersedia mengisi kuesioner dengan lengkap.

4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Adapun kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain

untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Variabel Independen

Dukungan Atasan

Dukungan atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan (Chenhall, 2004).

Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan diartikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi (Chenhall, 2004).

Pelatihan

Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem (Chenhall, 2004).

Metode Analisis Data

Untuk melihat hubungan antara Kualitas Audit dengan variabel independen yang telah ditentukan diatas dilakukan analisis regresi berganda menggunakan dengan bantuan komputer yang menggunakan program SPSS 16.0. Analisis ini dipakai untuk mempermudah melihat sejauh mana pengaruh variabel independen dan variabel dependen dengan rumus sebagai berikut:

$$SAKD = a + b_1DA + b_2KT + b_3P + e$$

Keterangan :

SAKD = Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

DA = Dukungan Atasan

KT = Kejelasan Tujuan

P = Pelatihan

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi

e = error

5. HASIL PENELITIAN

Yang menjadi objek penelitian adalah seluruh Sub bagian keuangan di kantor SKPD di kabupaten Klaten. Sedangkan pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria-kriteria pengambilan sampel yang telah ditentukan, diperoleh sampel sejumlah 60 responden.

Analisis data

Menurut hasil analisis deskriptif, diperoleh nilai rata-rata (mean) variable Dukungan Atasan adalah 35,5500 dengan standar deviasi sebesar 4,61547, sedangkan nilai minimum sebesar 26,00 dan nilai maximum sebesar 43,00. Nilai rata-rata (mean) variable Kejelasan Tujuan adalah sebesar 19,8833 dengan standar deviasi 2,31496, sedangkan nilai minimum sebesar 15,00 dan nilai maximum sebesar 25,00. Nilai rata-rata (mean) variable Pelatihan adalah sebesar 32,7333 dengan standar deviasi sebesar 3,94396, sedangkan nilai minimum sebesar 25,00 dan nilai maximum sebesar 40,00. Nilai rata-rata (mean) variable SAKD adalah sebesar 35,9833 dengan standar deviasi sebesar 4,55286, sedangkan nilai minimum sebesar 27,00 dan nilai maximum sebesar 45,00.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* diperoleh nilai *Kolmogrov-Smirnov Z* sebesar 0,758 dengan *asym Sig* 0,614. Nilai *asym sig* lebih besar daripada tingkat signifikansi ($0,614 > 0,05$) yang berarti data residual terdistribusi normal dan model regresi layak untuk dipakai dalam penelitian ini.

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas diketahui nilai *tolerance* Dukungan Atasan 0,630, Kejelasan Tujuan 0,479, Pelatihan 0,700 menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 (10%) dan hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa nilai *VIF* variabel bebas yaitu Dukungan Atasan 1,588, Kejelasan Tujuan 2,089, Pelatihan 1,428 kurang dari 10, artinya tidak ada kolerasi antar variabel bebas. Jadi dapat disimpulkan tidak ada gejala multikolinieritas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser menunjukkan bahwa nilai *absolute residual (ABRES)* dari semua variabel independen memiliki nilai

signifikansi > 0,05. Nilai probabilitas seluruh variabel bebas yaitu Dukungan Atasan 0,588, Kejelasan Tujuan 0,563, Pelatihan 0,862. Dengan demikian, model regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Model yang digunakan dalam regresi linear berganda bertujuan untuk menguji pengaruh Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan, Pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Tabel 1

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	t	Sig	Keterangan
	B			
Konstanta	2,031	0,476	0,636	
Dukungan Atasan	0,288	2.554	0,013	Signifikan
Kejelasan Tujuan	0,631	2.443	0,018	Signifikan
Pelatihan	0,341	2.718	0,009	Signifikan

Sumber : data diolah.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi. Hasil pengolahan data dengan bantuan komputer program SPSS versi 16 didapatkan persamaan regresi:

$$SAKD = 2,031 + 0,288DA + 0,631KT + 0,341P + e$$

Dari persamaan regresi linear berganda diatas dapat diketahui bahwa, Hasil koefisien regresi memperlihatkan konstanta sebesar 2,031 menunjukkan bahwa apabila variabel Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan, Pelatihan mengalami perubahan nilai konstanta akan tetap 2,031. Koefisien regresi DA yaitu dukungan atasan menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,288 dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila Dukungan Atasan meningkat sebesar satu-satuan maka kegunaan sistem akuntansi. Koefisien regresi KT yaitu kejelasan tujuan menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,631 dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila Kejelasan Tujuan meningkat sebesar satu-satuan maka kegunaan sistem akuntansi. Koefisien regresi P yaitu pelatihan menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,341 dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila Pelatihan meningkat sebesar satu-satuan maka kegunaan sistem akuntansi.

Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menguji tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Berdasarkan hasil pengolahan Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} = 21,710$ dengan probabilitas sebesar 0,000. Nilai probabilitas yaitu sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan indeks SAKD dapat dijelaskan oleh variabel Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan, Pelatihan.

Uji Parsial t (Uji t)

hasil uji t untuk mengetahui pengaruh variabel dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi.

Variabel dukungan atasan diketahui nilai t_{hitung} (2,554) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,013 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H1 diterima, artinya bahwa dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di seluruh SKPD di Kabupaten Klaten.

Variabel kejelasan tujuan diketahui nilai t_{hitung} (2,443) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,018 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H2 diterima, artinya bahwa kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di seluruh SKPD di Kabupaten Klaten.

Variabel pelatihan diketahui nilai t_{hitung} (2,718) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,009 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H3 diterima, artinya bahwa pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di seluruh SKPD di Kabupaten Klaten.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai *adjusted R²* sebesar 0,513 yang berarti sebesar 51,3% variabel dependen yaitu SAKD dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan, Pelatihan. Sisanya sebesar 48,7% SAKD dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

6. PEMBAHASAN

Pengaruh dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi

Variabel dukungan atasan diketahui nilai t_{hitung} (2,554) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,013 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H1 diterima, artinya bahwa dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Berarti penelitian ini mendukung penelitian Menurut Ihsan dan Ishak (2005: 7) dukungan manajemen puncak merupakan faktor penting dalam menentukan efektifitas penerimaan sistem informasi dalam organisasi. Tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila manajer (atasan) mendukung sepenuhnya dalam implementasi sistem baru, jika di suatu instansi pemerintahan tidak adanya dukungan manajemen puncak maka tujuan instansi pemerintahan tidak akan tercapai. Dukungan atasan memegang peranan penting dalam setiap tahap siklus pengembangan sistem dan dengan adanya dukungan manajemen puncak berarti atasan terlibat secara langsung dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam menentukan efektifitas sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Dan jika tidak adanya dukungan manajemen puncak maka sistem yang akan dikembangkan tidak akan sesuai dengan rencana perusahaan dan dengan demikian tujuan instansi pemerintah tidak akan tercapai.

Pengaruh kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi

Variabel kejelasan tujuan diketahui nilai t_{hitung} (2,443) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,018 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H2 diterima, artinya bahwa kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Menurut Gibson (1993) dalam Latifah (2007) tujuan perusahaan merupakan apa yang ingin dicapai oleh seseorang atau organisasi. Kejelasan tujuan dalam suatu organisasi dapat menentukan suatu keberhasilan sistem, karena sebagaimana mereka mencapai target untuk mencapai tujuan dengan menggunakan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki apabila kejelasan tujuan tidak digunakan secara tepat dan didukung secara aktif oleh atasan, maka kejelasan tujuan disuatu instansi pemerintahan tidak akan dapat meningkatkan keberhasilan. Kejelasan tujuan sangat berpengaruh dalam pengimplementasian sistem akuntansi keuangan daerah, karena kejelasan tujuan merupakan teknik yang ampuh untuk memotivasi karyawan dan apabila kejelasan tujuan tidak digunakan secara tepat dan didukung secara aktif oleh atasan, maka implementasi sistem akuntansi keuangan daerah tidak akan berhasil, sehingga kejelasan tujuan di suatu instansi pemerintahan tidak akan dapat meningkatkan hasil dalam mencapai tujuan instansi.

Pengaruh pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi

Variabel pelatihan diketahui nilai t_{hitung} (2,718) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,009 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H3 diterima, artinya bahwa pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Bodnar dan Hopwood (2003: 29). Bodnar menyatakan bahwa pelatihan membantu dalam mengembangkan keahlian kepemimpinan, memotivasi, kesetiaan, sikap yang lebih baik, dan aspek-aspek lainnya yang dapat menunjukkan keberhasilan karyawan dan manajer. Dengan pelatihan maka instansi pemerintah

akan lebih membantu karyawan untuk memperbaiki keahlian memimpin, lebih termotivasi, lebih setia pada instansi pemerintah, bersikap lebih baik menunjukkan keberhasilan karyawan dan manajer. Untuk dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas, perlu dilaksanakan pelatihan akuntansi dan pendidikan yang cukup memadai dan pengalaman bagian akuntansi itu sendiri, hal ini mengingat masih banyak terdapat laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan standar mutu yang baik.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dukungan Atasan mempunyai pengaruh terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan oleh besaran nilai signifikansi variabel Dukungan Atasan sebesar $0,013 < 0,05$ sehingga H_1 diterima. Kejelasan Tujuan mempunyai pengaruh terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan oleh besaran nilai signifikan variabel Kejelasan Tujuan sebesar $0,018 < 0,05$ sehingga H_2 diterima. Pelatihan mempunyai pengaruh terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan oleh besaran nilai signifikan variabel Pelatihan sebesar $0,009 < 0,05$ sehingga H_3 diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, 2004, Pengaruh kompetensi anggota DPRD, kompetensi aparatur pemerintah daerah pelaksanaan sistem informasi akuntansi, penganggaran serta kualitas informasi keuangan terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintah daerah yang baik (survey pada kabupaten/ kota Jawa Barat). *Desertasi Doktor pada Universitas Padjadjaran Bandung*, Bandung.
- Azhar, 2008, Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Aceh, *Thesis S2 Universitas Sumatra Utara*.
- Bodnar, G.H dan William S., Hopwood. 1995. *Accounting Information System*. Prentice Hall International. 6th. Ed.
- Bodnar, G.H dan William S, Hopwood. 2003. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi kedelapan. Jakarta: Indeks.
- Chenhall, R.H. 2004. The Role of Cognitive and Affective Conflict in Early Implementation of Activity-Based Cost Management. *Behavioral Research in Accounting* 16:19.
- Ghozali, Imam, 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit: Universitas Diponegoro Semarang
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit UNDIP: Semarang.
- Gibson, Ivancevich, dan Donnelly. 1993. *Organisasi Perilaku: Struktur Dan Proksi Edisi 5*. Jakarta: Erlangga.
- Heri Hidayat, 2008, Analisis Implikasi Ketidaksiharian Rancangan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKPD) Way Kanan Dengan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, *Thesis S2 Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta.
- Ikhsan, Arfan dan Ishak Muhammad. 2005. *Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriasari, Desi, 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *SNA XI*. Pontianak.

- Karunia Sari Nur, Pangesti, 2008, Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD: Studi Kasus Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, *Thesis S2* Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Latifah, Lyna dan S. Arifin, 2007. Faktor Keprilakuan Organisasi dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *SNA X*. Makasar
- Mahmudi (2007), *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, YKPN, Yogyakarta
- Nazir. 1999. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Nurlela, Siti dan Rahmawati, 2010, Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di subosukawonosraten. *SNA XIII*, Purwokerto.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-undang RI. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang RI. No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Rohman Abdul, 2009, Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (survey pada Pemda di Jawa Tengah), *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Vol. 9, No. 1, Februari 2009 : 21 – 32.
- Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods for Business, A Skill-Building Approach*. America: Thirt Edition, John Wiley & Sons, Inc.

